Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia
Volume 5, Nomor 3, Tahun 2026, Halaman 2333 – 2340
https://jpion.org/index.php/jpi
E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

Kolaborasi Pemerintah Nepal Dan Masyarakat Newar Dalam Menyeimbangkan Pelestarian Tradisi Kumari Dan Perlindungan Hak Anak

Angelika Galuh Surya Wijayanti [1)], Agistha Nuruliya Khairunnisa [2)] ,Hardi Alunaza[3)]

[1,2,3)]Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura

* Angelika Galuh Surya Wijayanti
Email : angelikagaluhsw@gmail.com

Abstrak

Tradisi Kumari merupakan salah satu warisan budaya dan keagamaan masyarakat Newar di Nepal yang menempatkan seorang anak perempuan sebagai manifestasi dewi hidup. Meskipun memiliki nilai spiritual dan budaya yang kuat, tradisi ini juga menimbulkan perhatian terhadap pemenuhan hak anak, terutama dalam aspek pendidikan, perkembangan sosial, dan kehidupan setelah masa pengabdian berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Nepal dan masyarakat Newar dalam menyeimbangkan pelestarian tradisi Kumari dengan perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis literatur ilmiah terkait tradisi Kumari, masyarakat Newar, dan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Nepal berperan dalam menyediakan kerangka hukum dan perlindungan anak, sedangkan masyarakat Newar berperan dalam mempertahankan nilai budaya dan religius tradisi Kumari. Hubungan keduanya menunjukkan adanya proses adaptasi, bukan penghapusan tradisi, sehingga Kumari dapat tetap dipertahankan tanpa mengabaikan hak dasar anak.

Kata kunci: *Kumari, Newar Community, Child Rights, Cultural Preservation, Nepal*

Abstract

The Kumari tradition is one of the cultural and religious heritages of the Newar community in Nepal, where a young girl is regarded as the manifestation of a living goddess. Although it has strong spiritual and cultural values, the tradition also raises concerns regarding children's rights, particularly education, social development, and life after the end of the Kumari period. This study aims to analyze the roles of the Nepalese government and the Newar community in balancing the preservation of the Kumari tradition with child protection. This research uses a descriptive qualitative method through a literature review of academic sources related to the Kumari tradition, the Newar community, and child protection. The findings show that the Nepalese government provides legal frameworks and child protection measures, while the Newar community maintains the cultural and religious values of the tradition. The relationship between both parties reflects an adaptation process rather than the elimination of tradition, allowing the Kumari tradition to continue while ensuring the protection of children's fundamental rights.

Keywords*: Kumari, Newar Community, Child Rights, Cultural Preservation, Nepal*

PENDAHULUAN

Nepal merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, agama, bahasa, dan tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan National Population and Housing Census 2021, jumlah penduduk Nepal mencapai sekitar 29,16 juta jiwa, dengan kelompok Newa atau Newar berjumlah 1.341.363 jiwa atau sekitar 4,6% dari total penduduk. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Newar merupakan salah satu kelompok etnis yang memiliki keberadaan penting dalam keragaman sosial dan budaya Nepal. Dalam aspek budaya, masyarakat Newar di Lembah Kathmandu dikenal memiliki berbagai praktik budaya, ritual, bahasa, dan festival yang menjadi bagian dari identitas kelompok mereka (Maharjan, 2024). Maharjan menjelaskan bahwa masyarakat Newar merupakan salah satu kelompok etnis asli Nepal yang memiliki kekayaan dalam praktik budaya khas, dan tradisi Kumari menjadi salah satu bentuk ritual penting dalam kebudayaan Newar.

Salah satu tradisi yang memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat Newar adalah Kumari, yaitu praktik penghormatan terhadap seorang anak perempuan yang dipercaya sebagai

E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

manifestasi dewi hidup. Tradisi ini menjadi bagian dari kehidupan budaya dan keagamaan masyarakat Newar di Lembah Kathmandu. Maharjan (2024) menjelaskan bahwa Kumari Culture merupakan ritual sakral masyarakat Newar yang menempatkan anak perempuan dari komunitas Buddha Newar sebagai living goddess. Hal yang sama ditegaskan oleh Phelu (2025), yang menyebutkan bahwa Kumari di Bhaktapur dipandang sebagai representasi Dewi Taleju dan menjadi simbol kekuatan feminin ilahi, sekaligus bagian dari identitas budaya masyarakat Newar. Tradisi Kumari juga memiliki dimensi historis dan politik karena dalam perkembangannya ritual tersebut berkaitan dengan kerajaan Malla dan legitimasi kekuasaan, sementara pada masa kini keberadaannya tetap dipertahankan sebagai simbol budaya dan keagamaan masyarakat Nepal (Phelu, 2025).

Tradisi Kumari merupakan salah satu warisan budaya dan keagamaan masyarakat Newar di Nepal, khususnya di Lembah Kathmandu. Anak perempuan yang menjadi Kumari dipilih melalui sejumlah kriteria fisik, keagamaan, astrologis, dan budaya. Poddar (2025) menjelaskan bahwa calon Kumari harus berasal dari kelompok Newar Shakya dan melalui proses seleksi yang melibatkan pemeriksaan atribut fisik, horoskop, latar belakang keluarga, serta kriteria ritual tertentu. Proses seleksi juga dilakukan oleh komite yang terdiri atas pemuka agama, pejabat, astrolog, serta otoritas budaya, dengan tujuan menentukan anak yang dianggap memenuhi syarat untuk menjalankan peran sebagai Kumari. Setelah terpilih, anak tersebut diperlakukan sebagai figur sakral dan menjalankan fungsi keagamaan dalam berbagai upacara serta festival. Phelu (2025) menjelaskan bahwa Kumari dipandang sebagai perwujudan Taleju dan tetap memiliki peran sentral dalam ritual serta kehidupan komunitas Newar. Status tersebut berlangsung sampai anak mencapai pubertas atau mengalami menstruasi, yang dalam tradisi menandai berakhirnya kedudukan sebagai Kumari dan kembalinya anak pada status kehidupan biasa (Poddar, 2025).

Status Kumari ini memberikan perubahan besar terhadap kehidupan anak. Dimana aktivitas sehari-hari, interaksi sosial, kebebasan bergerak, serta akses terhadap pendidikan dapat menjadi terbatas karena adanya aturan dan tuntutan selama menjalankan peran sebagai Kumari. Selama memangku status kumari, anak tidak boleh disentuh karena merupakan representasi dari seorang dewi. Persoalan ini dapat berlanjut setelah masa Kumari berakhir karena mantan Kumari harus kembali menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial sebagai masyarakat biasa setelah sebelumnya memperoleh status yang sangat dihormati. Selain itu, terdapat kepercayaan di sebagian masyarakat bahwa laki-laki yang menikahi mantan Kumari dapat mengalami kesialan atau bahkan meninggal pada usia muda. Meskipun kepercayaan tersebut tidak memiliki bukti ilmiah dan bukan merupakan larangan hukum, stigma tersebut dapat menjadi salah satu hambatan dalam proses reintegrasi sosial mantan Kumari.

Tradisi Kumari di Nepal tidak hanya dipandang sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai bagian penting dari identitas budaya masyarakat Newar di Lembah Kathmandu. Paudel (2022) menjelaskan bahwa Kumari merupakan tradisi yang diwariskan antargenerasi dan menempatkan anak perempuan prapubertas dari komunitas Shakya sebagai figur sakral yang dipercaya mengalami transformasi simbolik dari anak biasa menjadi dewi hidup. Tradisi tersebut memiliki makna sosial dan budaya yang kuat, sehingga keberlangsungannya terus dipertahankan oleh masyarakat meskipun terdapat pandangan yang mendukung maupun mengkritik praktik tersebut. Dalam konteks modern, perdebatan mengenai Kumari menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan pelaksanaan tradisi dengan perubahan nilai sosial tanpa menghilangkan makna budaya dan ritual yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Newar. Dengan demikian, pelestarian tradisi Kumari perlu dilakukan melalui pendekatan yang mempertimbangkan keberlanjutan nilai budaya sekaligus perkembangan kehidupan anak yang menjalankan peran tersebut (Paudel, 2022).

Pelaksanaan tradisi Kumari dalam masyarakat Nepal menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara nilai keagamaan, identitas budaya, dan perkembangan hak anak dalam sistem hukum modern. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas masyarakat Newar yang telah berkembang dalam kehidupan sosial

E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

Nepal. Kumari dipandang sebagai manifestasi energi spiritual yang telah dihormati selama berabad-abad dan menjadi salah satu warisan budaya Nepal yang memiliki nilai historis serta religius. Tradisi tersebut memiliki keterkaitan dengan kepercayaan Hindu dan Buddha yang berkembang dalam masyarakat Nepal, sehingga keberadaannya tidak hanya dipahami sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai simbol budaya masyarakat setempat (Ghimire, 2018).

Dalam perspektif masyarakat Newar, keberadaan Kumari memiliki hubungan erat dengan sistem sosial dan keagamaan yang berkembang di Lembah Kathmandu. Kumari tradisional sebagian besar berasal dari komunitas Newar, khususnya kelompok Shakya, dan memiliki keterkaitan dengan struktur keagamaan masyarakat tersebut. Kedudukan Kumari tidak hanya memberikan makna spiritual bagi masyarakat, tetapi juga menunjukkan bagaimana tradisi lokal dapat bertahan melalui mekanisme sosial dan budaya yang diwariskan antargenerasi. Oleh karena itu, upaya perlindungan hak anak dalam tradisi Kumari perlu dilakukan dengan pendekatan yang mempertimbangkan nilai budaya masyarakat Newar agar perubahan yang dilakukan tidak dianggap sebagai penghilangan identitas budaya (Ghimire, 2018).

Meskipun memiliki nilai budaya yang kuat, status sebagai Kumari membawa perubahan besar terhadap kehidupan seorang anak. Anak yang dipilih sebagai Kumari akan menjalani kehidupan khusus di Kumari House selama masa pengabdiannya dan memperoleh perlakuan berbeda dibandingkan anak-anak lainnya. Setelah masa Kumari berakhir, anak tersebut harus kembali kepada keluarga dan menjalani kehidupan sebagai masyarakat biasa. Perubahan status sosial yang sangat berbeda tersebut menunjukkan pentingnya perhatian terhadap proses adaptasi anak, terutama dalam aspek pendidikan, hubungan sosial, serta kesiapan menghadapi kehidupan setelah tidak lagi menjadi Kumari (Jeong-Seok, 2022).

Dalam konteks perlindungan anak, pemerintah Nepal memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik budaya tetap berjalan tanpa menghilangkan hak dasar anak. Konstitusi Nepal memberikan perlindungan terhadap berbagai hak anak, termasuk hak memperoleh pendidikan, kesehatan, perawatan yang layak, serta perkembangan kepribadian secara menyeluruh. Negara dan keluarga juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak. Dengan demikian, anak yang menjalankan peran sebagai Kumari tetap memiliki kedudukan sebagai individu yang memperoleh perlindungan hukum sebagaimana anak-anak lainnya (Jha, 2024).

Perlindungan terhadap anak dalam tradisi Kumari juga diperkuat melalui The Act Relating to Children, 2018. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa tujuan utama perlindungan anak adalah menjaga kepentingan terbaik anak melalui penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu tradisi budaya maupun keagamaan harus tetap mempertimbangkan kebutuhan perkembangan anak. Dalam konteks Kumari, tradisi dapat tetap dilestarikan selama pelaksanaannya tidak menyebabkan hilangnya hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta kesempatan untuk berkembang secara optimal (Government of Nepal, 2018).

Salah satu bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan pemerintah Nepal dan masyarakat Newar adalah menjamin keberlangsungan pendidikan Kumari selama menjalankan perannya. Pendidikan menjadi aspek penting karena masa menjadi Kumari berlangsung pada periode perkembangan anak yang menentukan masa depan. Negara Nepal telah memberikan jaminan bahwa setiap anak memiliki hak memperoleh pendidikan, kesehatan, serta perkembangan kepribadian. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pendidikan yang dapat menyesuaikan kondisi Kumari sehingga tanggung jawab ritual tidak menghilangkan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan formal maupun pengembangan kemampuan pribadi (Jha, 2024) (Government of Nepal, 2018).

Selain pendidikan, hubungan anak dengan keluarga juga menjadi aspek penting dalam perlindungan Kumari. Status sebagai figur sakral tidak menghilangkan kebutuhan anak terhadap dukungan emosional dan hubungan sosial dengan keluarga. The Act Relating to Children 2018 menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup bersama keluarga, memperoleh

E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

perlindungan, kasih sayang, dan perawatan dari orang tua atau wali. Oleh karena itu, masyarakat Newar dan pengelola tradisi Kumari perlu memastikan bahwa hubungan keluarga tetap terjaga selama masa pengabdian anak agar perkembangan sosial dan emosional anak tetap terpenuhi (Government of Nepal, 2018).

Pendekatan perlindungan anak modern juga menempatkan partisipasi anak sebagai salah satu aspek penting. Anak tidak hanya dipandang sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki pengalaman dan pandangan terhadap kehidupan yang dijalaninya. Dalam konteks Kumari, pengalaman Kumari dan mantan Kumari dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tradisi. Children Act 2018 Nepal memberikan pengakuan terhadap hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam tradisi budaya perlu dilakukan dengan mempertimbangkan suara dan pengalaman anak itu sendiri (Bishnu Chandra Nepali, 2026; Jha, 2024), (Government of Nepal, 2018).

Perhatian terhadap perlindungan Kumari juga perlu diberikan setelah masa pengabdian berakhir. Mantan Kumari harus menghadapi perubahan kehidupan dari seorang figur yang dihormati secara religius menjadi anggota masyarakat biasa. Perubahan tersebut dapat memerlukan dukungan dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi agar proses reintegrasi berjalan dengan baik. Dalam perkembangan terbaru, pemerintah Nepal telah memberikan beberapa bentuk dukungan terhadap mantan Kumari, termasuk bantuan tertentu setelah mereka meninggalkan status tersebut. Hal ini menunjukkan adanya upaya negara untuk memperhatikan kesejahteraan Kumari tidak hanya selama masa pengabdian, tetapi juga setelahnya (Jeong-Seok, 2022).

Dengan demikian, keseimbangan antara pelestarian tradisi Kumari dan perlindungan hak anak membutuhkan kerja sama antara pemerintah Nepal dan masyarakat Newar. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan kerangka hukum, pelayanan pendidikan, kesehatan, serta mekanisme perlindungan anak, sedangkan masyarakat Newar memiliki peran dalam mempertahankan nilai budaya dan memastikan bahwa perubahan dilakukan dengan tetap menghormati makna religius tradisi. Meskipun Nepal telah memiliki berbagai regulasi mengenai perlindungan anak, tantangan utama masih terdapat pada tahap implementasi dan penguatan mekanisme perlindungan di masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara negara dan komunitas budaya menjadi faktor penting agar tradisi Kumari tetap dapat dipertahankan tanpa mengabaikan hak dasar anak (Jha & Nepali, 2026).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research) melalui berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tradisi Kumari, masyarakat Newar, serta perlindungan hak anak di Nepal. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (qualitative content analysis) dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Metode analisis isi kualitatif digunakan untuk memahami makna yang terdapat dalam dokumen dan literatur secara sistematis sehingga dapat menjelaskan hubungan antara pelestarian tradisi budaya Kumari dengan upaya perlindungan hak anak di Nepal (Prasad, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Nepal dan Masyarakat Newar dalam Perlindungan Hak Kumari

Hasil analisis menunjukkan bahwa tradisi Kumari tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari kehidupan budaya dan keagamaan masyarakat Newar di Nepal, tetapi juga memiliki

E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

keterkaitan dengan pemenuhan hak anak. Anak perempuan yang terpilih sebagai Kumari harus menjalani proses ritual tertentu dan menempati posisi sakral sebagai manifestasi dewi yang hidup. Meskipun kedudukan tersebut memberikan penghormatan khusus, status sebagai Kumari juga membawa konsekuensi terhadap kehidupan sehari-hari anak. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan dalam aktivitas sosial, akses pendidikan, kebebasan bergerak, serta interaksi dengan lingkungan di luar kehidupan ritual. Dengan demikian, tradisi Kumari memperlihatkan adanya hubungan yang kompleks antara upaya mempertahankan tradisi budaya dan keagamaan dengan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak yang menjalaninya (Sigdel, 2021).

Persoalan mengenai hak anak dalam tradisi Kumari kemudian menjadi bagian dari perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung Nepal dan diputus pada tahun 2008. Jeong-Seok (2021) menjelaskan bahwa perkara tersebut muncul setelah seorang aktivis hak asasi manusia mengajukan keberatan terhadap praktik Kumari dengan alasan adanya potensi pelanggaran terhadap hak anak, khususnya berkaitan dengan kehidupan Kumari yang relatif terpisah dari kehidupan sosial biasa selama menjalankan perannya. Dalam putusannya, Mahkamah Agung Nepal tidak menghapus tradisi Kumari, tetapi mengakui praktik tersebut sebagai bagian dari warisan budaya Nepal yang tetap dapat dipertahankan. Pada saat yang sama, persoalan mengenai kondisi kehidupan dan perlindungan terhadap anak yang menjalankan peran sebagai Kumari tetap menjadi perhatian dalam proses penyesuaian tradisi tersebut (Jeong-Seok, 2021).

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Kumari tidak diselesaikan dengan menempatkan tradisi budaya dan hak anak sebagai dua kepentingan yang harus saling meniadakan. Sebaliknya, tradisi Kumari tetap memperoleh ruang untuk dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Newar dan Nepal, sementara praktik-praktik yang berkaitan dengan kehidupan anak dapat mengalami penyesuaian mengikuti perubahan sosial. Jeong-Seok (2021) menunjukkan bahwa setelah perubahan politik Nepal, tradisi Kumari mengalami pergeseran dari ritual yang sebelumnya sangat berkaitan dengan legitimasi kerajaan menjadi bagian dari tradisi budaya yang tetap dipertahankan dalam negara demokratis dan sekuler.

Dalam penelitian ini, kondisi tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa pelestarian tradisi tidak selalu identik dengan mempertahankan seluruh praktik dalam bentuk yang sama. Tradisi dapat tetap dipertahankan ketika terdapat penyesuaian terhadap aspek-aspek yang berpotensi membatasi pemenuhan hak anak. Dengan demikian, persoalan utama dalam tradisi Kumari terletak pada bagaimana nilai budaya dan keagamaan dapat tetap dipertahankan bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan anak sebagai individu.

Pemerintah Nepal memiliki peran penting dalam membangun perlindungan terhadap anak perempuan yang menjalankan peran sebagai Kumari. Keterlibatan negara tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan tradisi, tetapi juga dengan upaya memastikan bahwa anak yang menjalankan peran sakral tersebut tetap memperoleh hak dasar sebagai seorang anak. Jeong-Seok (2021) menjelaskan bahwa persoalan hak Kumari menjadi perhatian lembaga peradilan Nepal ketika praktik tersebut dipersoalkan dari sudut pandang hak anak. Dalam putusan yang dianalisis oleh Park, Mahkamah Agung Nepal tidak menghapus tradisi Kumari, tetapi tetap memberikan ruang bagi keberlangsungan tradisi tersebut sebagai bagian dari warisan budaya Nepal.

Perhatian terhadap pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam perlindungan tersebut. Kondisi pendidikan Kumari diketahui berbeda-beda menurut wilayah. Kumari di Kathmandu dan Patan memperoleh pendidikan melalui guru privat, sedangkan Kumari di beberapa wilayah lain seperti Bhaktapur dapat mengikuti pendidikan sekolah dengan pembatasan yang lebih sedikit. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa praktik Kumari tidak sepenuhnya seragam sehingga perlindungan terhadap hak pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing komunitas (Jeong-Seok, 2021). Selain pendidikan, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan sosial, termasuk dukungan bagi Kumari setelah masa pengabdiannya berakhir. Jeong-Seok (2022) menunjukkan bahwa mantan Kumari

E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

pada masa kini dapat memperoleh bentuk dukungan tertentu dari pemerintah, termasuk bantuan sosial setelah tidak lagi menjalankan peran sakral.

Keterlibatan pemerintah menunjukkan bahwa negara tidak hanya dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan atau menghapus tradisi. Sebaliknya, pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap praktik Kumari agar tetap dapat berlangsung dengan memperhatikan perkembangan nilai hak anak. Pendekatan tersebut menjadi penting karena Kumari tetap merupakan seorang anak yang memiliki kebutuhan terhadap pendidikan, kesehatan, perkembangan sosial, dan kehidupan yang layak meskipun pada saat yang sama memiliki kedudukan religius yang tinggi dalam masyarakat.

Di sisi lain, keberlangsungan tradisi Kumari tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat Newar. Tradisi tersebut merupakan bagian dari praktik budaya dan keagamaan yang telah diwariskan dalam kehidupan masyarakat Newar di Lembah Kathmandu. Maharjan (2024) menjelaskan bahwa budaya Kumari merupakan salah satu bentuk ritual khas masyarakat Newar dan memiliki hubungan erat dengan identitas budaya komunitas tersebut. Anak perempuan yang dipilih sebagai Kumari berasal dari komunitas Buddha Newar tertentu dan kemudian ditempatkan sebagai figur sakral dalam kehidupan ritual masyarakat.

Masyarakat Newar memiliki pengetahuan budaya mengenai proses pemilihan, ritual, simbol, tata cara penghormatan, pakaian, dan berbagai praktik keagamaan yang berkaitan dengan Kumari. Kajian Phelu (2025) menunjukkan bahwa berbagai simbol dan ritual dalam tradisi Kumari, khususnya di Bhaktapur, memiliki makna sosial dan spiritual yang berkaitan dengan identitas masyarakat Newar. Tradisi tersebut tidak hanya memiliki fungsi keagamaan, tetapi juga berperan dalam memperkuat hubungan sosial dan mempertahankan identitas komunitas.

Namun, mempertahankan tradisi tidak selalu berarti mempertahankan setiap praktik tanpa perubahan. Maharjan (2024) menunjukkan bahwa tradisi Kumari terus berhadapan dengan perdebatan antara kepentingan pelestarian budaya dan perlindungan terhadap anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Newar tidak hanya berperan sebagai pihak yang mempertahankan tradisi, tetapi juga sebagai aktor penting dalam proses penyesuaiannya. Nilai spiritual dan simbolik tradisi dapat tetap dipertahankan, sementara praktik yang berkaitan dengan kesejahteraan anak dapat mengalami perubahan.

Hubungan antara pemerintah Nepal dan masyarakat Newar dalam keberlangsungan Kumari dengan demikian dapat dipahami sebagai proses penyesuaian antara perlindungan hukum dan pelestarian budaya. Bukti yang tersedia tidak selalu menunjukkan adanya program kolaborasi formal antara kedua pihak. Namun, terdapat keterlibatan negara melalui proses hukum dan kebijakan, sementara masyarakat Newar mempertahankan legitimasi sosial dan budaya tradisi tersebut. Jeong-Seok (2021) menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Nepal tidak menempatkan penghapusan tradisi sebagai solusi utama, tetapi mengakui Kumari sebagai bagian dari warisan budaya yang tetap dapat dipertahankan dalam masyarakat Nepal.

Perubahan sistem politik Nepal juga memperlihatkan kemampuan tradisi Kumari untuk beradaptasi. Setelah berakhirnya sistem monarki, tradisi Kumari tidak ikut menghilang. Posisi ritual yang sebelumnya berkaitan erat dengan kekuasaan kerajaan mengalami perubahan, tetapi Kumari tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya dan keagamaan Nepal. Jeong-Seok (2021) menjelaskan bahwa perubahan tersebut menunjukkan pergeseran tradisi Kumari dari ritual yang berkaitan erat dengan kerajaan menjadi tradisi budaya masyarakat Newar dan Nepal yang tetap bertahan dalam sistem politik yang baru. Dengan demikian, pemerintah memiliki instrumen hukum untuk melindungi hak anak, sedangkan masyarakat Newar memiliki peran dalam mempertahankan nilai budaya yang menjadi dasar keberlangsungan tradisi.

Pendidikan, Reintegrasi, dan Pelestarian Tradisi Kumari secara Adaptif

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pembahasan perlindungan hak anak dalam tradisi Kumari. Jeong-Seok (2021) menunjukkan adanya variasi

E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

dalam pola pendidikan Kumari. Di Kathmandu dan Patan, pendidikan dapat dilakukan melalui guru privat, sedangkan Kumari di beberapa wilayah seperti Bhaktapur memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti sekolah secara langsung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan pendidikan bukan merupakan karakter yang seragam dalam seluruh praktik Kumari. Oleh karena itu, perlindungan hak pendidikan perlu diarahkan pada penyediaan akses belajar yang memadai dengan tetap memperhatikan konteks budaya komunitas yang menjalankan tradisi tersebut.

Persoalan pendidikan juga berkaitan dengan proses kehidupan setelah seorang anak tidak lagi menjadi Kumari. Poddar (2025) menunjukkan bahwa pendidikan dan kehidupan sosial menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan mengenai dampak tradisi Kumari terhadap anak. Perubahan dari kedudukan sebagai figur sakral menuju kehidupan sebagai anggota masyarakat biasa memerlukan proses adaptasi, khususnya dalam lingkungan pendidikan dan hubungan sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap Kumari tidak cukup hanya dilakukan selama masa pengabdian, tetapi juga perlu memperhatikan kehidupan anak setelah status tersebut berakhir.

Meskipun demikian, anggapan bahwa semua mantan Kumari selalu mengalami kesulitan berat dalam kembali ke masyarakat perlu dipahami secara hati-hati. Jeong-Seok (2022) menunjukkan bahwa beberapa gambaran mengenai kehidupan mantan Kumari berasal dari generalisasi terhadap pengalaman tertentu. Dalam praktiknya, mantan Kumari dapat kembali menjalani kehidupan bersama keluarga dan masyarakat serta memperoleh dukungan tertentu setelah menyelesaikan masa pengabdian. Dengan demikian, reintegrasi lebih tepat dipahami sebagai proses memastikan agar mantan Kumari tetap memperoleh akses terhadap pendidikan, hubungan sosial, dukungan ekonomi, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang layak.

Dalam konteks yang lebih luas, pelestarian tradisi Kumari dan perlindungan hak anak tidak harus dipahami sebagai dua kepentingan yang selalu bertentangan. Tradisi dapat tetap dipertahankan sambil menyesuaikan praktik tertentu dengan perkembangan sosial dan prinsip perlindungan anak. Maharjan (2024) menempatkan Kumari sebagai ritual budaya yang memiliki arti mendalam bagi masyarakat Newar, sementara Poddar (2025) menyoroti pentingnya mempertimbangkan pendidikan, pengalaman masa kanak-kanak, serta hak individu dalam keberlangsungan tradisi tersebut.

Perubahan yang telah terjadi dalam praktik Kumari memperlihatkan sifat adaptif dari tradisi tersebut. Pendidikan bagi Kumari semakin mendapatkan perhatian, sementara bentuk dukungan terhadap mantan Kumari juga mulai berkembang. Jeong-Seok (2021) menjelaskan bahwa tradisi dan praktik budaya tidak harus bersifat tetap, tetapi dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi masyarakat. Pada saat yang sama, perubahan tersebut tidak berarti menghilangkan tradisi Kumari sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Newar dan Nepal.

Perbedaan praktik antarwilayah juga memperlihatkan kemampuan tradisi Kumari untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sosial. Phelu (2025), misalnya, menunjukkan bahwa Kumari di Bhaktapur memiliki pola kehidupan yang berbeda dibandingkan dengan praktik Kumari yang lebih dikenal di Kathmandu. Temuan tersebut menegaskan bahwa tradisi Kumari tidak bersifat tunggal dan kaku, tetapi dapat memiliki bentuk yang berbeda sesuai dengan komunitas yang menjalankannya.

Dengan demikian, pelestarian budaya yang adaptif dapat menjadi pendekatan yang relevan dalam menjaga keberlangsungan tradisi Kumari sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak anak. Pemerintah dapat menyediakan kerangka hukum dan perlindungan sosial, sedangkan masyarakat Newar tetap mempertahankan nilai spiritual, ritual, dan budaya yang menjadi dasar tradisi tersebut. Penyesuaian pada aspek pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial, dan kondisi setelah masa pengabdian dapat menjadi titik temu antara upaya mempertahankan identitas budaya dan pemenuhan hak anak.

E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, kolaborasi antara pemerintah Nepal dan masyarakat Newar dalam tradisi Kumari menunjukkan adanya upaya untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian budaya dan perlindungan hak anak. Tradisi Kumari sebagai bagian dari identitas budaya dan keagamaan masyarakat Newar memiliki nilai historis serta spiritual yang penting bagi masyarakat Nepal, namun pelaksanaannya juga menghadirkan tantangan dalam pemenuhan hak anak, khususnya terkait pendidikan, perkembangan sosial, kebebasan bergerak, kesehatan, dan kehidupan setelah masa pengabdian berakhir. Pemerintah Nepal berperan melalui kerangka hukum dan kebijakan perlindungan anak untuk memastikan bahwa tradisi tersebut tetap berjalan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan masyarakat Newar berperan dalam menjaga keberlangsungan nilai budaya, ritual, dan makna religius yang melekat pada Kumari. Hubungan antara kedua pihak tidak menunjukkan adanya upaya untuk menghilangkan tradisi, melainkan membentuk proses adaptasi agar tradisi Kumari dapat tetap dipertahankan dalam konteks masyarakat Nepal modern. Dengan demikian, keseimbangan antara pelestarian tradisi dan perlindungan hak anak dapat dicapai melalui pendekatan kolaboratif, di mana pemerintah menyediakan perlindungan kelembagaan sementara masyarakat Newar mempertahankan legitimasi budaya dari tradisi tersebut. Pendekatan ini memungkinkan tradisi Kumari tetap menjadi bagian dari warisan budaya Nepal tanpa mengabaikan hak anak yang menjalankan peran sebagai Kumari.

REFERENSI

Bishnu Chandra Nepali. (2026). *Revisiting Nepal's Children Act, 2018: A Contemporary Legal Analysis*. *25*(1).

Ghimire, H. L. (2018). *A Study of Living Godess Kumārī : Th e Source of Cultural Tourism in Nepal*.

Jeong-Seok, P. (2021). 과도기(*2006~2008*) 네팔의쿠마리관습–. 139–172.

Jeong-Seok, P. (2022). 네팔의쿠마리(*Kumari*) 관습 그하뮤와살상 카트만두쿠마리사례를 중심으로* *1)*. 1–46.

Jha, J. (2024). *Rights of Children Under the Constitution of Nepal : An Investigation*. *9*(1), 11–21. https://doi.org/10.56201/jlgp.v9.no1.2024.pg11.21

Maharjan, R. (2024). *Kumari CUlture: A Ritualistic and Dialectic Performance*. *02*, 71–80. https://doi.org/https://doi.org/10.3126/skmj.v2i2.62502

Paudel, J. R. (2022). *Research Article KUMARI TRADITIONS : A STUDY ON PERFORMATIVE ACTIVITY CRITICAL ANALYSIS OF KUMARI TRADITIONS*. *04*(November), 3580–3582.

Phelu, R. (2025). *The Living Goddess : Sign and Significance of Bhaktapur ' s Kumari Culture*. *10*(4), 39–44. https://doi.org/10.22161/ijels

Poddar, P. (2025). *Tradition , Modernity , and the Female Body : A Critical Study of the Kumari Tradition in Nepal*. *12*(2), 60–70.

Prasad, B. D. (2019). *Qualitative Content Analysis : Why is it Still a Path Less Taken ? 20*(3).

Sigdel, S. (2021). *LIVING GODDESS: KUMARI CULTURE IN NEPAL*. 1–27.